

SEMESTER I-2013

Hutama Karya Harus Bangun 3 Ruas Tol Trans-Sumatera

JAKARTA – PT Hutama Karya mendapat instruksi untuk segera mengerjakan pembangunan tiga ruas jalan tol Trans-Sumatera, tanpa perlu menunggu penugasan pemerintah maupun penyertaan modal negara (PMN).

Instruksi tersebut datang dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dahlan menargetkan agar ketiga ruas jalan tol itu dapat mulai dikerjakan Hutama Karya pada semester I-2013.

"Hutama Karya pembicaraannya (soal perpres dan PMN) masih panjang. Untuk itu, saya minta mulai saja, jangan tunggu pembicaraan-panjang. Tidak perlu ke-22 ruasnya dikerjakan, tiga ruas saja dikerjakan dulu," ujar Dahlan di Jakarta, Selasa (19/2).

Adapun ketiga ruas jalan tol itu adalah ruas jalan tol Medan-Binjai, Bakauheni-Lampung, dan Palembang-Inderalaya. Menurut Dahlan, dari ke-22 ruas jalan tol trans Sumatera, ketiga ruas jalan tol tersebut memiliki tingkat pengembalian investasi atau *internal rate of return* (IRR) di atas 13%.

Dengan demikian, pengerjaan ketiga ruas itu semestinya dapat dikerjakan terlebih dahulu oleh PT Hutama Karya, tanpa perlu mengandalkannya solusi pendanaan dari pe-

merintah. Dia meminta agar manajemen PT Hutama Karya dapat mulai mengerjakan pembangunannya pada semester I-2013.

"Kami minta Hutama Karya mencari pendanaannya, tidak tergantung pada skema pemerintah. Kalau mau obligasi silakan," ungkap Dahlan. Saat ini, manajemen Hutama Karya tengah mempelajari secara rinci pembangunan ketiga ruas tol itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap PT Hutama Karya guna mengerjakan proyek jalan tol Trans Sumatera. Dukungan itu dapat berbentuk dukungan pembiayaan, baik melalui pemberian penyertaan modal negara (PMN), penerusan pinjaman dari luar negeri (*subsidiary loan agreement/SLA*), atau melalui penerbitan infrastruktur berbasis proyek.

Namun, dalam memperoleh dukungan pendanaan tersebut, BUMN karya ini harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan memperoleh penugasan dari pemerintah. Agus juga meminta PT Hutama Karya untuk membuat kajian kelayakan (*feasibility study*) yang baik atas perencanaan pembangunan jalan tol tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya Tri Widjajanto menuturkan, guna menggarap pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, pihaknya perlu meningkatkan ekuitas perusahaan. Pasalnya, pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer membutuhkan investasi sekitar Rp 360 triliun.

Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, lanjut dia, hanya bisa dibangun melalui tiga skema, yakni dibangun melalui dana APBN, melalui skema *private public partnership/* kerja sama pemerintah-swasta dengan dukungan dana *viability gap fund/VGF* (dana dukungan kelayakan), serta melalui penugasan kepada BUMN. Bahkan, jika pengerjaan proyek ini menggunakan skema PPP, perhitungan yang dilakukan Hutama Karya menunjukkan dana VGF yang dibutuhkan sekitar Rp 150 triliun.

Untuk itu, skema paling rasional adalah melalui penugasan kepada BUMN melalui peraturan presiden. Hutama Karya, lanjut Tri, jikapun diberi penugasan oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, tetap membutuhkan jaminan pemerintah dalam hal penjaminan dan penyertaan modal negara karena kurang layaknya proyek tersebut. (nti)